

Peran notaris dalam rapat umum pemegang saham untuk jual beli saham perseroan (Studi kasus pada PT. BIB berdasarkan Putusan Nomor : 608/PDT/2008/PT.DKI)

Claudia Ratnawati S., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=131561&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini membahas peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk persetujuan jual beli saham pada Perseroan Terbatas. Jual beli saham merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas. Jual beli saham yang dibahas dalam tesis ini adalah jual beli saham yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham adalah salah satu organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Berdasarkan Berita Acara Rapat PT. BIB, penulis menemukan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh orang yang kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT. BIB dan juga pemegang saham PT. BIB yang beritikad tidak baik. Selanjutnya Akta Jual Beli Saham dibuat dengan Direktur Utama yang juga pemegang saham sebagaimana di atas, untuk melakukan perubahan kepemilikan saham miliknya yang telah dialihkan dan kemudian dialihkan kembali kepada pihak lain, sehingga terjadi benturan kepentingan. Berdasarkan Putusan Nomor: 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST dan diperkuat dengan Putusan Nomor : 608/PDT/2008/PT.DKI, Komisaris Utama yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan kabur (obscuur libel). Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan berkewajiban memberikan penyuluhan hukum dan memberikan pelayanan pembuatan akta dengan menanyakan, meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, meneliti agar dokumen dalam penyusunan akta lengkap dan dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak-pihak yang memerlukan jasanya, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Perbuatan Pemegang Saham yang merangkap juga sebagai Komisaris Utama PT. BIB merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pembeli lainnya yang dirugikan dengan perubahan kepemilikan saham.

<hr>

Abstract

This thesis explores the role of the Notary in the General Meeting of Shareholders for approval of sale and purchase of shares in Limited Liability Company. Share purchase is a legal act that resulted in a change of ownership of shares in limited liability companies. Buying and selling shares discussed in this thesis is to purchase

shares requires the approval of the General Meeting of Shareholders. General Shareholders' Meeting is one of the organs of the company that represents the interests of all shareholders in the limited liability company. Based on page the Minutes of Meeting PT. BIB, the authors found that the Annual General Meeting of Shareholders by people who position as President Commissioner of PT. BIB and also shareholders of PT. BIB is not well intentioned. Furthermore, the Deed of Sale and Purchase of Shares made by Director who is also the holder of shares as above, to make changes in his shareholding has been removed and then transferred back to the other party, so there is a conflict of interest. Based on the Decision Number: 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST and strengthened by Decision Number: 608/PDT/2008/PT.DKI, the relevant Commissioner found guilty of unlawful acts and vague claims (libel obseuur) . This research is a juridical-normative with descriptive design. The research concludes that the notary concerned is obliged to provide legal counseling and provides services making the deed by asking, requesting the documents needed, scanning documents to complete the preparation of the deed and can meet the intent and desire of the parties who require their services, with legal notice applicable. Shareholders who concurrently acts also as the President Commissioner of PT. BIB is an unlawful act as defined under Article 1365 Civil Code, giving rise to an obligation to indemnify the other buyers are harmed by changes in share Ownership.